

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan pada level satuan kerja organisasi perangkat daerah dan disusun sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra) yang berisi informasi tentang rencana program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh OPD dalam satu tahun anggaran yang dilengkapi dengan kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta member gambaran mengenai tujuan, sasaran dan target kinerja dan bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan OPD sesuaiTupoksinya.

Renja OPD memiliki fungsi yang sangat penting dalam melaksanakan pembangunan untuk menjaga kualitas social masyarakat yang berlangsung saat ini maka diperlukan rancangan awal dari rencana kerja Tahun 2025.

Untuk melaksanakan program pembangunan Tahun 2025 maka diperlukan kebijakan dan penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi Tahun2025 berdasarkan kebutuhan yang berorientasi skala prioritas sesuai dengan sumberdaya yang dimiliki.

#### **B. Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2002 tentang Keuangan Negara (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jambi 2005 – 2025;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi;
15. Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang perubahan atas perda No. 6 Tahun 2009 tentang pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Prov. Jambi 2016-2023.
17. Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi;

18. Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi.

#### C. Maksud Dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi.

Adapun yang menjadi Tujuan dari penyusunan Renja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi yaitu sebagai berikut:

1. Mengetahui kondisi umum pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi Tahun 2024;
2. Mengetahui kebijakan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi Tahun 2024;
3. Sebagai pedoman pelaksanaan program pembangunan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi Tahun 2025.

#### D. Sistematika Penulisan Renja Perangkat Daerah

Sistematis penulisan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi tahun 2025 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

##### **Bab I Pendahuluan**

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

##### **Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah**

- A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- B. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- C. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- D. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

##### **Bab III Tujuan Dan Sasaran Perangkat daerah**

- A. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- B. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah
- C. Program dan Kegiatan

##### **Bab IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah**

##### **Bab V Penutup**

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH**

#### **A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Dan Capaian Renja Perangkat Daerah**

Berdasarkan evaluasi Rencana Kerja Tahun 2023, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) Provinsi Jambi mengajukan usulan program sebanyak 7 (Tujuh) program dan kegiatan sebanyak 15 ( Lima belas ) serta 28 ( Dua puluh delapan ) Sub Kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

##### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**

- a. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - 1). Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - 1). Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - 1). Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
  - 2). Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - 3). Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - 4). Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 1). Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi . SumberDaya Air dan Listrik
  - 3). Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan
  - 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - 3) Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

##### **2. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan**

- a. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender ( PUG ) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi
  - 1). Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi
- b. Pemberdayaan Perempuan, Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi
  - 1). Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi.

**c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi**

- 1) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi.
- 2) Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi

**3. Program Perlindungan Perempuan**

- a. Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Provinsi Dan Lintas Daerah Kab/Kota
  - 1). Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi.
- b. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi
  - 1). Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa

**4. Program Pemenuhan Hak Anak**

- a. Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
  - 1). Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
  - 2). Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak Bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi

**5. Program Perlindungan Khusus Anak**

- a. Pencegahan kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi Dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
  - 1). Advokasi Kebijakan Dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program Dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Provinsi
  - 2). Koordinasi Dan Sinkronisasi Pencegahan kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Provinsi
- b. Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi
  - 1). Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi

## **6. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat**

- a. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat Yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- 1). Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan KarangTaruna ) Lembaga Adat Desa / Kelurahan Dan Masyarakat Hukum Adat.
  - 2). Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
  - 3). Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga.

## **7. Program Pengendalian Penduduk**

Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerinta Pusat dengan pemerintah Daerah Provinsi Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk.

- 1). Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA – MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada OrmasPengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat

Dari seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian PendudukProvinsi Jambi Tahun 2023, capaian kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan mencapai **97.34 %** .

Program dan kegiatan pada tahun berjalan yaitu tahun 2023 mencakup 12 (Dua Belas) program, 23 ( dua puluh tiga ) Kegiatan dan 36 (Tiga Puluh Enam) Sub kegiatan, dapat dilihat melalui table berikut:

**Tabel 1**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023**  
**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi**

NO	NAMA KEGIATAN	NAMA PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN	APBD MURNI	PERUBAHAN	APBD SETELAH PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN			SISA ANGGARAN Rp.
						KEUANGAN		FISIK(%)	
						Rp.	%	REAL	
<b>I</b>	<b><i>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</i></b>								
<b>1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>215.236.926,00</b>	<b>- 58.158.000,00</b>	<b>157.078.926,00</b>	<b>155.444.921,00</b>	<b>98,96</b>	<b>100,00</b>	<b>1.634.005,00</b>
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Trianingsih, M.E	215.236.926,00	- 58.158.000,00	157.078.926,00	155.444.921,00	98,96	100,00	1.634.005,00
<b>2</b>	<b>Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>9.479.165.930,00</b>	<b>- 11.515.921,00</b>	<b>9.467.650.009,00</b>	<b>9.147.476.655,00</b>	<b>96,62</b>	<b>100,00</b>	<b>320.173.354,00</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Poppy Arisandi	9.479.165.930,00	- 11.515.921,00	9.467.650.009,00	9.147.476.655,00	96,62	100,00	320.173.354,00
<b>3</b>	<b>Admisitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>70.261.000,00</b>	<b>- 65.311.000,00</b>	<b>4.950.000,00</b>	<b>4.950.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Ulil Fahmi, S.Th.I	70.261.000,00	- 65.311.000,00	4.950.000,00	4.950.000,00	100,00	100,00	0,00
<b>4</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>385.198.950,00</b>	<b>29.872.518,00</b>	<b>415.071.468,00</b>	<b>413.523.466,00</b>	<b>99,63</b>	<b>100,00</b>	<b>1.548.002,00</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Ulil Fahmi, S.Th.I	12.283.100,00	- 4.766.400,00	7.516.700,00	7.447.079,00	99,07	100,00	69.621,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Ulil Fahmi, S.Th.I	109.874.900,00	- 9.933.795,00	99.941.105,00	98.565.874,00	98,62	100,00	1.375.231,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggunaan	Ulil Fahmi, S.Th.I	20.000.950,00	- 6.653.196,00	13.347.754,00	13.244.604,00	99,23	100,00	103.150,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Ulil Fahmi, S.Th.I	243.040.000,00	51.225.909,00	294.265.909,00	294.265.909,00	100,00	100,00	0,00
<b>5</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>313.593.965,00</b>	<b>- 54.649.659,00</b>	<b>258.944.306,00</b>	<b>247.298.779,00</b>	<b>95,50</b>	<b>100,00</b>	<b>11.645.527,00</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Ulil Fahmi, S.Th.I	3.510.000,00	-	3.510.000,00	3.510.000,00	100,00	100,00	0,00

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Ulil Fahmi, S.Th.I	119.459.880,00	- 14.776.880,00	104.683.000,00	96.670.889,00	92,35	100,00	8.012.111,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Ulil Fahmi, S.Th.I	190.624.085,00	- 39.872.779,00	150.751.306,00	147.117.890,00	97,59	100,00	3.633.416,00
<b>6</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>574.809.200,00</b>	<b>- 227.149.000,00</b>	<b>347.660.200,00</b>	<b>338.873.176,00</b>	<b>97,47</b>	<b>100,00</b>	<b>8.787.024,00</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Ulil Fahmi, S.Th.I	270.050.000,00	- 68.260.000,00	201.790.000,00	195.561.075,00	96,91	100,00	6.228.925,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Ulil Fahmi, S.Th.I	205.189.200,00	- 68.260.000,00	136.929.200,00	134.522.375,00	98,24	100,00	2.406.825,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Ulil Fahmi, S.Th.I	99.570.000,00	- 90.629.000,00	8.941.000,00	8.789.726,00	98,31	100,00	151.274,00
<b>II</b>	<b>Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan</b>								
<b>1</b>	<b>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi</b>		<b>110.539.075,00</b>	<b>- 43.689.075,00</b>	<b>66.850.000,00</b>	<b>66.568.000,00</b>	<b>99,58</b>	<b>100,00</b>	<b>282.000,00</b>
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Reski Darosa, AM. Keb	110.539.075,00	- 43.689.075,00	66.850.000,00	66.568.000,00	99,58	100,00	282.000,00
<b>2</b>	<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi</b>		<b>97.800.000,00</b>	<b>- 16.471.100,00</b>	<b>81.328.900,00</b>	<b>81.207.900,00</b>	<b>99,85</b>	<b>100,00</b>	<b>121.000,00</b>
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Reski Darosa, AM. Keb	97.800.000,00	- 16.471.100,00	81.328.900,00	81.207.900,00	99,85	100,00	121.000,00
<b>3</b>	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi</b>		<b>469.999.784,00</b>	<b>- 74.457.400,00</b>	<b>395.542.384,00</b>	<b>394.895.505,00</b>	<b>99,84</b>	<b>100,00</b>	<b>646.879,00</b>
	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Reski Darosa, AM. Keb	469.999.784,00	- 74.457.400,00	395.542.384,00	394.895.505,00	99,84	100,00	646.879,00
<b>III</b>	<b>Perlindungan Perempuan</b>								

<b>1</b>	<b>Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>65.050.000,00</b>	<b>- 22.654.000,00</b>	<b>42.396.000,00</b>	<b>42.295.000,00</b>	<b>99,76</b>	<b>100,00</b>	<b>101.000,00</b>
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Reski Darosa, AM. Keb	65.050.000,00	- 22.654.000,00	42.396.000,00	42.295.000,00	99,76	100,00	101.000,00
<b>2</b>	<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>279.998.352,00</b>	<b>- 23.520.000,00</b>	<b>256.478.352,00</b>	<b>255.025.918,00</b>	<b>99,43</b>	<b>100,00</b>	<b>1.452.434,00</b>
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Anna Solifariza, SE	279.998.352,00	- 23.520.000,00	256.478.352,00	255.025.918,00	99,43	100,00	1.452.434,00
<b>3</b>	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi</b>		<b>74.596.000,00</b>	<b>948.542,00</b>	<b>75.544.542,00</b>	<b>73.773.704,00</b>	<b>97,66</b>	<b>100,00</b>	<b>1.770.838,00</b>
	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi (DAK)	Reski Darosa, AM. Keb	74.596.000,00	948.542,00	75.544.542,00	73.773.704,00	97,66	100,00	1.770.838,00
<b>IV</b>	<b>Pemenuhan Hak Anak (PHA)</b>								
<b>1</b>	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi</b>		<b>165.585.056,00</b>	<b>38.480.000,00</b>	<b>204.065.056,00</b>	<b>203.428.389,00</b>	<b>99,69</b>	<b>100,00</b>	<b>636.667,00</b>
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Sri Hartati, S.E	83.693.076,00	50.000.000,00	133.693.076,00	133.575.809,00	99,91	100,00	117.267,00
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Sri Hartati, S.E	81.891.980,00	- 11.520.000,00	70.371.980,00	69.852.580,00	99,26	100,00	519.400,00
<b>V</b>	<b>Perlindungan Khusus Anak</b>								

<b>1</b>	<b>Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>183.841.828,00</b>	<b>15.276.864,00</b>	<b>199.118.692,00</b>	<b>197.274.701,00</b>	<b>99,07</b>	<b>100,00</b>	<b>1.843.991,00</b>
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Sri Hartati, S.E	74.141.828,00	-	74.141.828,00	74.050.701,00	99,88	100,00	91.127,00
	Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan Provinsi (DAK)	Sri Hartati, S.E	109.700.000,00	15.276.864,00	124.976.864,00	123.224.000,00	98,60	100,00	1.752.864,00
<b>2</b>	<b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi</b>		<b>254.504.000,00</b>	<b>81.362.116,00</b>	<b>335.866.116,00</b>	<b>335.860.707,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5.409,00</b>
	koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Provinsi (DAK)	Anna Solifariza, SE	254.504.000,00	81.362.116,00	335.866.116,00	335.860.707,00	100,00	100,00	5.409,00
<b>VI</b>	<b><i>Penataan Desa</i></b>								
<b>1</b>	<b>Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat</b>		<b>45.012.600,00</b>	<b>- 3.286.280,00</b>	<b>41.726.320,00</b>	<b>41.726.320,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	Rizka Yolanda, SH	45.012.600,00	- 3.286.280,00	41.726.320,00	41.726.320,00	100,00	100,00	0,00
<b>VI</b>	<b><i>Peningkatan Kerjasama Desa</i></b>								
	<b>Fasilitasi Kerja Sama antar Desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi</b>		<b>89.997.264,00</b>	<b>- 30.000.000,00</b>	<b>59.997.264,00</b>	<b>59.997.264,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Bayu Eka Putra, S.E	89.997.264,00	- 30.000.000,00	59.997.264,00	59.997.264,00	100,00	100,00	0,00
<b>VI</b>	<b><i>Administrasi Pemerintah Desa</i></b>								
<b>1</b>	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa</b>		<b>364.681.882,00</b>	<b>- 60.864.650,00</b>	<b>303.817.232,00</b>	<b>281.743.584,00</b>	<b>92,73</b>	<b>100,00</b>	<b>22.073.648,00</b>
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Rizka Yolanda, SH	50.071.500,00	- 40.071.500,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	100,00	0,00

	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba desa dan Kelurahan	Rizka Yolanda, SH	244.613.132,00	-	244.613.132,00	222.539.484,00	90,98	100,00	22.073.648,00
	Fasilitasi Pengembangan Inovasi Desa	Bayu Eka Putra, S.e	69.997.250,00	- 20.793.150,00	49.204.100,00	49.204.100,00	100,00	100,00	0,00
<b>IX</b>	<b><i>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, lembaga Adat dan masyarakat Hukum Adat</i></b>								
<b>1</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang pemberdayaan Desa dan lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang masyarakat Pelakunya Hukum adat yang sama berada di Lintas daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>1.744.763.121,00</b>	<b>- 86.449.957,00</b>	<b>1.658.313.164,00</b>	<b>1.643.298.128,00</b>	<b>99,09</b>	<b>100,00</b>	<b>15.015.036,00</b>
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Rizka Yolanda, SH	125.000.750,00	- 1.935.132,00	123.065.618,00	123.065.618,00	100,00	100,00	0,00
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan asli Daerah	Bayu Eka Putra, S.E	114.997.264,00	- 54.000.000,00	60.997.264,00	60.997.264,00	100,00	100,00	0,00
	Fasilitasi Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Bayu Eka Putra, S.E	89.999.910,00	- 30.514.825,00	59.485.085,00	59.479.910,00	99,99	100,00	5.175,00
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Rizka Yolanda, SH	1.414.765.197,00	-	1.414.765.197,00	1.399.755.336,00	98,94	100,00	15.009.861,00
<b>X</b>	<b><i>Pengendalian Penduduk</i></b>					<b>236.901.973,00</b>			
	<b>Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Rangka Pengendalian Kuantitas penduduk</b>		<b>142.816.762,00</b>	<b>- 31.857.760,00</b>	<b>110.959.002,00</b>	<b>110.331.924,00</b>	<b>99,43</b>	<b>100,00</b>	<b>627.078,00</b>
	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal	Dian Noviana Rusti, SKM, MPH	142.816.762,00	- 31.857.760,00	110.959.002,00	110.331.924,00	99,43	100,00	627.078,00
<b>XI</b>	<b><i>Pembinaan Keluarga Berencana (KB)</i></b>								

	<b>Pengembangan Desain Program, Pengelplaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana (KB) sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>		53.276.524,00	- 9.993.524,00	43.283.000,00	43.283.000,00	100,00	100,00	0,00
	Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konsling kesehatan Reproduksi dan Hak-hak reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Dian Noviana Rusti, SKM, MPH	53.276.524,00	- 9.993.524,00	43.283.000,00	43.283.000,00	100,00	100,00	0,00
<b>XI</b>	<b><i>Pemberdayaan dan peningkatan</i></b>								
<b>I</b>	<b><i>Keluarga Sejahtera (KS)</i></b>								
	<b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah provinsi dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan dan Kesejahteraan Keluarga</b>		89.252.024,00	- 5.760.000,00	83.492.024,00	83.287.049,00	99,75	100,00	204.975,00
	Peningkatan Kapasitas mitra dan Organisasi Masyarakat dalam pengelolaan Program Katahanan Keluarga melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi keluarga	Dian Noviana Rusti, SKM, MPH	89.252.024,00	- 5.760.000,00	83.492.024,00	83.287.049,00	99,75	100,00	204.975,00
	<b>Jumlah</b>		<b>15.269.980.243,00</b>	<b>- 659.847.286,00</b>	<b>14.610.132.957,00</b>	<b>14.221.564.090,00</b>	<b>97,34</b>	<b>100,00</b>	<b>388.568.867,00</b>

## **B. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan terutama Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi, bahwa kinerja pelayanan yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi yang berkaitan dengan urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan. Adapun lingkup pelayanan wajib Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi, terdiri atas :

1. Bidang Pemberdayaan Perempuan;
2. Bidang Perlindungan Anak;
3. Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan;
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
5. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Pencapaian kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi melalui bidang urusan tersebut diatas dapat dilihat capaian kinerja melalui indikator:

**Tabel 2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**  
**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi**

No	Indikator	SPM/ Standar t Nasiona l	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah (%)				Raealisas i Capaian	Proyeksi (%)				Catat an Anali sis
				2022	2023	2024	2025		2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Indeks Pembangunan Gender; (IPG)	-		91,5	91,5	91,5	91,5	90,30%	100%	100%	100%		
2	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan pelayanan komprehensif	-		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
3	Indeks Kesetaraan dan Keadilan Gender	-		0,85	0,85	0,85	0,85	96,41%	100%	100%	100%		
4	Persentase Pengelolaan Data Gender	-		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
5	Persentase Kab/Kota Layak Anak	-		9 Kab/ kota	9 Kab/ kota	11 Kab/ kota	11 Kab/ kota	95,53%	100%	100%	100%		
6	Indeks Perlindungan Anak	-		67	67,62	69,87	70	91,68%	100%	100%	100%		
7	Persentase Peningkatan Pelaksanaan Kerjasama Desa	-		50%	60%	70%	80%	70%	100%	100%	100%		
8	Meningkatkan Status Perkembangan KPPN	-		30	40	50	50	30%	100%	100%	100%		
	Persentase Fasilitasi Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	-		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	Persentase Aparatur/Pengurus Kelembagaan yang memiliki kompetensi dala Tata Kelola Pemerintahan Desa	-		90%	90%	90%	90%	90%	100%	100%	100%		
	Jumlah Desa Mandiri	-		134	141	148	155	96,90%	100%	100%	100%		
	Jumlah Desa Berkembang	-		807	767	731	694	99,76%	100%	100%	100%		
	Jumlah Desa Tertinggal	-		84	80	76	72	98,43%	100%	100%	100%		
	Persentase Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan lembaga adat dan masyarakat hukum adat	-		100%	100%	100%	100%	98,74%	100%	100%	100%		

Persentase Kab/Kota yang desanya telah ditata kelembagaan desanya sesuai standar	-		90%	90%	90%	90%	97,68%	100%	100%	100%	
Persentase Fasilitasi Pengelolaan Administrasi Desa	-		100%	100%	100%	100%	99,02%	100%	100%	100%	
Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	-		1,70%	1,68%	1,65%	1,62%	99,46%	100%	100%	100%	
Persentase Penggunaan Alat Kontrasepsi Keluarga Berencana	-		65,44%	65,48%	65,50%	65,52%	97,35%	100%	100%	100%	
Indeks pembangunan Keluarga	-		60,32	60,35	60,39	60,45	98,46%	100%	100%	100%	
Nilai Evaluasi Sakip	-		B	B	B	B	95,36%	100%	100%	100%	
IKM	-		Baik	Baik	Baik	Baik	81,40%	100%	100%	100%	

### **C. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah**

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi mempunyai tugas pokok Membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah Provinsi sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan dan melaksanakan kebijakan daerah baik strategis maupun teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk;
2. Pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya;
3. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya;
4. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Gubernur;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas dan pokok Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi

1. Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dapat dilihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan;
2. Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja perempuan ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap tenaga kerja perempuan;
3. Belum terpenuhinya hak-hak anak seperti akte kelahiran, PAUD, hidup sehat, sekolah ramah anak, puskesmas ramah anak dan pengasuhan yang aman;
4. Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
5. Masih banyaknya jumlah desa tertinggal;
6. Masih kurangnya pengetahuan aparat desa dalam pengelolaan keuangan dan penyusunan rencana pembangunan desa;
7. Kurangnya pelaksanaan tata kelola pemerintah yang baik;
8. Ditemukannya desa yang belum melakukan administrasi secara baik dan adanya desa yang belum menerapkan SPM;
9. Rendahnya partisipasi laki-laki ber-KB;
10. Masihnya rendahnya sosialisasi tentang KB dan WUS;
11. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM tenaga penyuluh KB;
12. Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need);
13. Masih banyaknya pernikahan dibawah usia 20 tahun dikarenakan kebutuhan

sosial;

14. Kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi.

#### **D. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan kerangka dan langkah awal dalam menghimpun dan menyusun semua rencana kebutuhan pembangunan daerah. Sudah menjadi kewajaran apabila kebutuhan akan selalu lebih besar daripada sumber daya yang dimiliki. Melihat dan membandingkan antara keinginan (rencana pembangunan) dengan realita kemampuan yang dimiliki. Sehingga dilakukan seleksi terhadap rencana pembangunan untuk menuju skala prioritas rencana pembangunan yang hingga akhirnya diusulkan rumusan kebijakan umum anggaran.

Dengan berdasarkan beberapa pertimbangan yang baik dari pusat, provinsi maupun daerah, RKPD tahun 2023 ditetapkan lebih mengarah kepada :

1. Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dalam bidang ekonomi, social budaya, politik, hukum dan pemerintahan;
2. Peningkatan Penanganan terhadap Kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
3. Peningkatan perlindungan terhadap hak-hak anak;
4. Peningkatan tata kelola pemerintahan Desa dan kelurahan;
5. Peningkatan pelayanan dan pemenuhan ber-KB;
6. Optimaslisasi sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar masyarakat.

Review terhadap rancangan RKPD dimaksudkan untuk membandingkan rumusan hasil identifikasi program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi yang meliputi identitas prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolak ukur atau target sasaran program/kegiatan serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan.

**Tabel 3**  
**Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024**  
**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi**

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	<b>PROVINSI JAMBI</b>				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	<b>PROVINSI JAMBI</b>					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN						
	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi					Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi						
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi		Jumlah kab/kota yang dilakukan koordinasi dan sinkronisasi tentang perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	dok	1	78.000.000		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah kab/kota yang dilakukan koordinasi dan sinkronisasi tentang perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	dok	1	85.800.000
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi							Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi				

Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta yang mengikuti Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	dok	1	350.000.000	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta yang mengikuti Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	dok	1	385.000.000
<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>					<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>				
<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>					<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>				
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah kab/kota yang dilakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	%	100	225.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah kab/kota yang dilakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	%	100	247.500.000
<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi</b>					<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi</b>				
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta yang mengikuti Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	dok	1	69.020.000	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta yang mengikuti Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	dok	1	75.922.000
<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>					<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>				

	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi</b>					<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi</b>						
	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang mengikuti Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi yang dikoordinasikan dan disinkronisasikan	dok	1	75.000.000	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang mengikuti Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi yang dikoordinasikan dan disinkronisasikan	dok	1	82.500.000		
	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>					<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>						
	<b>Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>					<b>Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>						
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah kab/kota yang dikoordinasikan dan disinkronisasikan upaya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	dok	1	101.500.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah kab/kota yang dikoordinasikan dan disinkronisasikan upaya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	dok	1	111.650.000		
	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>					<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>						
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah kab/kota yang diperkuat Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	dok	1	235.480.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah kab/kota yang diperkuat Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	dok	1	259.028.000		

<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>					<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>					
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>					<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>					
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dok	15	150.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dok	15	165.000.000	
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>					<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>					
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	bln	14	10.223.617.203	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	bln	14	11.245.978.923	
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>					<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>					
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	org	100	29.920.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	org	100	32.912.000	
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>					<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>					
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	lap	1	5.073.140	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	lap	1	5.580.454	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	lap	1	100.001.184	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	lap	1	110.001.302	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	lap	1	200.459.892	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	lap	1	220.505.881	
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	lbr	1200	1.500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	lbr	1200	1.650.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	bln	12	119.459.880	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	bln	12	131.405.868	

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	bln	12	130.001.603	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	bln	12	143.001.763
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	bln	12	270.050.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	bln	12	297.055.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	bln	12	205.189.200	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	bln	12	225.708.120
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara/ direhabilitasi	bln	12	210.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara/ direhabilitasi	bln	12	231.000.000
<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>					<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>				
<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>					<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>				
Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah kab/kota yang difasilitasi pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	dok	1	250.000.000	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah kab/kota yang difasilitasi pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	dok	1	275.000.000
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>					<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>				

<p><b>Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b></p>					<p><b>Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b></p>					
<p>Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna</p>	<p>Jumlah Pemerintah Desa yang difasilitasi dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna</p>	<p>lap</p>	<p>1</p>	<p>100.000.000</p>	<p>Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna</p>	<p>Jumlah Pemerintah Desa yang difasilitasi dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna</p>	<p>lap</p>	<p>1</p>	<p>110.000.000</p>	
<p>Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga</p>	<p>Jumlah Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga yang difasilitasi</p>	<p>lap</p>	<p>1</p>	<p>1.400.000.000</p>	<p>Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga</p>	<p>Jumlah Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga yang difasilitasi</p>	<p>lap</p>	<p>1</p>	<p>1.540.000.000</p>	
<p><b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b></p>					<p><b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b></p>					
<p><b>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b></p>					<p><b>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b></p>					
<p>Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi</p>	<p>tersusunya Laporan GDPK</p>	<p>dok</p>	<p>1</p>	<p>400.000.000</p>	<p>Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi</p>	<p>tersusunya Laporan GDPK</p>	<p>dok</p>	<p>1</p>	<p>500.000.000</p>	
<p><b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b></p>					<p><b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b></p>					

	<b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>					<b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>					
	Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Jumlah Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga yang ditingkatkan kapasitasnya	dok	1	75.000.000	Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Jumlah Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga yang ditingkatkan kapasitasnya	dok	1	82.500.000	
					<b>15.004.272.102</b>						<b>16.564.699.312</b>

#### **E. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat**

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi merupakan hasil rumusan perencanaan yang dimulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kabupaten dan tingkat Provinsi.

### **BAB III**

#### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

##### **A. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi**

Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi dikaitkan dengan kebijakan Nasional, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi termasuk dalam bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan dan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Nasional (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), Laju Pertumbuhan Penduduk, Penurunan Desa Tertinggal dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa/Kelurahan.

Pencapaian tersebut ditandai dengan dilakukannya beberapa program prioritas Nasional dan Provinsi antara lain:

1. Pembentukan UPTD PPA Provinsi Jambi dan penyediaan rumah aman dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
2. Pembentukan kampung KB;
3. Pembentukan Desa mandiri.

##### **B. Tujuan Dan sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah**

Berdasarkan rumusan tujuan dan sasaran Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2021-2026 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi dan mengacu pada kebijakan dan strategi Pembangunan Nasional dan Provinsi Jambi Tahun 2021, maka dirumuskan tujuan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi, sebagaiberikut :

1. Meningkatkan kualitas hidup dan keberdayaan perempuan dalam berbagai bidang pembangunan;
2. Meningkatkan Kesejahteraan Anak dalam Pemenuhan, Penghormatan dan perlindungan Anak;
3. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa dan kelurahan;
4. Meningkatkan pemberdayaan, Pelayanan Sosial Dasar dan penguatan ekonomi masyarakat desa berbasis potensi ekonomi lokal;
5. Mewujudkan pengendalian penduduk dan keluarga yang sehat dan sejahtera.

Sedangkan sasaran Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi Tahun 2025, yaitu :

**Tabel 4**  
**Tujuan dan Sasaran**

<b>NO</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
1.	Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dan PUHA dalam Pembangunan	Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan
		Meningkatnya penanganankasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
		Meningkatnya Pemenuhan Hak-Hak Anak	Persentase Jumlah Kab/Kota Layak Anak
2.	Meningkatkan usaha ekonomi masyarakat, lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Usaha Ekonomi Masyarakat	Persentase BumDesa yang terbentuk
		Meningkatnya Kapasitas lembaga kemasyarakatan yang aktif	Persentase peningkatan lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif
			Persentase Peningkatan Kelompok masyarakat yang mengelola dan memanfaatkan SDA dan TTG
		Meningkatnya kemandirian pengelolaan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Mandiri
3.	Menurunnya rata-rata laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Jambi	Menurunnya Total Fertility Rate (TFR) Per Perempuan usia reproduksi	Total Fertility Rate (TFR)
4.	Meningkatnya fungsi dan peran Lembaga adat desa dan masyarakat hukum adat dalam pembangunan	Persentase pemberdayaan Lembaga Masyarakat Desa, Lembaga Desa, dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat

### **C. Program Dan Kegiatan**

Dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 mengacu pada Permendagri No.50 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi akan melaksanakan program /kegiatan yang terdiri dari 14 (empat belas) Program, 32 (tiga puluh dua) Kegiatan dan 154 (Seratus lima puluh empat) Sub Kegiatan diantaranya sebagai berikut :

## 1. PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD
  - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
  - Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD Perubahan DPA-SKPD
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
  - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
  - Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- c. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
  - Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
  - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
  - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi
  - Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
  - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - Fasilitas Kunjungan Tamu
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - Pengadaan Mebel
  - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah
  - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan daerah
  - Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - Pemeliharaan Mebel
  - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

## **2. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN (PUG)**

- a. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Provinsi
  - Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi
  - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi
  - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi
  - Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi
- b. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
  - Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi
  - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi
  - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
  - Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi

## **3. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**

- a. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi
  - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi
  - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi
- b. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
  - Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
  - Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban tindak kekerasan kewenangan provinsi
- c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi
  - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi
  - Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi

- Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi
- Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

#### **4. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**

- a. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi
  - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota
  - Komunikasi, Informasi, Edukasi kesetaraan gender dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi
  - Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi
- b. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi
  - Pelaksanaan Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- c. Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah
  - Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi
  - Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi

#### **5. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**

- a. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan penyajian Data Gender dan Anak dalam kelembagaan Data di Tingkat Daerah
  - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
  - Koordinasi dan sinkronisasi kelembagaan pemenuhan hak anak kewenangan provinsi

#### **6. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**

- a. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
  - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
  - Koordinasi dan sinkronisasi kelembagaan pemenuhan hak anak kewenangan provinsi
- b. Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
  - Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
  - Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan

Kualitas Hidup Anak KewenanganProvinsi

- PengembanganKomunikasi, Informasi dan EdukasiPemenuhanHak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
- Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak KewenanganProvinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

## **7. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**

- a. PencegahanKekerasanterhadap Anak yang Melibatkan Para PihakLingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah
  - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak KewenanganProvinsi
  - Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan provinsi
- b. Penyedia Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi Tingkat daerah
  - Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
  - Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan KhususKewenanganProvinsi
  - Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus KewenanganProvinsi
  - Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
- c. Penguatan dan Pengembangan lembaga penyedia Layanan Bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan lintas Daerah Kabupaten/Kota
  - Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
  - Koordinasi dan sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
  - Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi

## **8. PROGRAM PENTAAN DESA**

- a. Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan Kepala Desa dan DesaAdat
  - Identifikasi, inventarisasi dan fasilitasi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan DesaAdat yang menjadi kewenangan Provinsi
  - Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat
  - Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa
  - Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa

## **9. PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA**

- a. Fasilitasi Kerjasama AntarDesa yang menjadikewenanganProvinsi
  - FasilitasiKerja Sama antarDesa Lintas Kabupaten/Kota
  - FasilitasiKerja Sama DesadenganPihakKetigasi
  - Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

## **10. PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**

- a. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan PemerintahanDesa
  - FasilitasiPenyusunanPeraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota yang Mengatur Desa
  - PembinaanManagemenPemerintahanDesa
  - Fasilitasi PenyusunanProduk Hukum Desa
  - Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan desa
  - Fasilitasi pengelolaan keuangan desa
  - Fasilitasi pengelolaan aset desa
  - Fasilitasi pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
  - Fasilitasi pelaksanaan Evaluasi PerkembanganDesasertaLombaDesa dan Kelurahan
  - Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan
  - Pembinaan Aparatur PemerintahDesa
  - Pembinaan peningkatan kapasitas Anggota BPD
  - Pembinaan percepatan pembangunan melalui iBantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis
  - PelaksanaanPenugasanUrusan/KewenanganProvinsi yang dilaksanakan oleh Desa
  - Pembinaan dan pengawasan atas Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalamPembiayaanDesa
  - Pembinaan dan pengawasan Penetapan Pengaturan BUM DesaKabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antarDesa
  - FasilitasiPenetapan dan Penegasan Batas Desa
  - Fasilitaspembinaanlaporankepaladesa
  - FasilitasiPencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota
  - Fasilitasperan BPD dalam Penyelenggaraan PemerintahanDesa
  - FasilitasiPengembanganInovasiDesa
  - Fasilitasi Pekan InovasiPerkembanganDesa
  - FasilitasiPenetapanKewenanganDesa dan DesaAdat di Kabupaten/Kota

## **11. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**

- a. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat Yang Sama berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- Identifikasi dan inventarisasi Masyarakat Hukum Adat
  - Fasilitasi, penataan, pemberdayaan dan pendagayunaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
  - Peningkatan kapasitas kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
  - Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
  - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
  - Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
  - Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
  - Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa
  - Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

## **12. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**

- a. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintahan Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
- Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)
  - Penyusunan dan pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi
  - Advokasi dan sosialisasi GDPK
  - Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal
  - Penyediaan dan pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Untuk SLTA-MA sesuai Kearifan Lokal
  - Penyediaan dan pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Untuk Jalur Formal Melalui Kediklatan, Kepramukaan dan Jalur Nonformal Melalui Kelompok Kegiatan Masyarakat/Umum Sesuai Kearifan Lokal
  - advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat

- Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK
  - Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan
  - Advokasi dan sosialisasi Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan
  - Advokasi dan sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK dan Sektor Lain
  - Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pencatatan dan pelaporan
- b. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi
- Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) dan Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan
  - Koordinasi, penyediaan, dan pengolahan Data Kependudukan Berbasis Keluarga
  - Pemetaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
  - Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan
  - Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kerentaman Dampak Kependudukan (Early Warning System/Peringatan Dini)
  - Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
  - Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pendataan dan Pemutakhiran Data Keluarga

### **13. PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA**

- a. Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal
- Pengembangan Strategi Operasional Advokasi, Promosi Sesuai Kearifan Lokal
  - Pengembangan dan penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal
  - Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal
  - Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja
  - Penguatan Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program KKBPK

- Pengembangan Strategi Operasional Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal
  - Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal
- b. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi
- Pengembangan strategi operasional dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi masyarakat dalam pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB
  - Peningkatan peran serta dan kerjasama organisasi masyarakat dalam pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB
  - Pengembangan dan penguatan jejaring kemitraan dalam Program KKBPK

#### **14. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA**

- a. Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
- Penyediaan Kebijakan Daerah bagi Pengembangan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
  - Pengembangan Prototype Materi Pembangunan Keluarga Sesuai dengan Kearifan Lokal
  - Pembinaan pelaksanaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
  - Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana
  - Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja
  - Peningkatan kapasitas Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)
  - Pengembangan dan perbanyak Materi Substansi Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R), Media Promosi, Alat Permainan Edukatif Remaja, dan Sarana Prasarana Lainnya yang Dibutuhkan
  - Fasilitasi Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB
  - Penyediaan Kebijakan dalam rangka Penyiapan Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK)
  - Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK
  - Penyediaan dan pengembangan Materi IPK
  - Advokasi, Sosialisasi dan Promosi IPK
  - Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK
  - Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK
  - Penyediaan Sarana Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK

- b. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
- Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)
  - Penguatan pemberdayaan ekonomi Keluarga
  - Sosialisasi dan Promosi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga
  - Fasilitasi Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung KB

Tabel 4

## RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Rencana Tahun 2025		
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
				Tolok Ukur	Target				Tolok Ukur	Target	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>											
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>											
<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>											
<b>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi</b>											
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah kab/kota yang dilakukan koordinasi dan sinkronisasi tentang perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen	Prov. Jambi	dok	1	78.000.000	PAD		dok	1	85.800.000
<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi</b>											
Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta yang mengikuti Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	jumlah lembaga penyedia layanan	Prov. Jambi	dok	1	350.000.000	PAD		dok	1	385.000.000
<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>											
<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>											

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah kab/kota yang dilakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	persentase korban yang terlayani	Prov. Jambi	%	100	225.000.000	<b>PAD</b>	%	100	247.500.000
<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi</b>										
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta yang mengikuti Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	jumlah lembaga penyedia layanan	Prov. Jambi	dok	1	69.020.000	<b>DAK</b>	dok	1	75.922.000
<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>										
<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi</b>										
Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang mengikuti Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi yang dikoordinasikan dan disinkronisasikan	Jumlah Dokumen	Prov. Jambi	dok	1	75.000.000	<b>PAD</b>	dok	1	82.500.000
<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>										
<b>Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>										

Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah kab/kota yang dikoordinasikan dan disinkronisasikan upaya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen	Prov. Jambi	dok	1	101.500.000	DAK	dok	1	111.650.000
<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>										
Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah kab/kota yang diperkuat Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen	Prov. Jambi	dok	1	235.480.000	DAK	dok	1	259.028.000
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>										
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>										
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah yang disusun	Prov. Jambi	dok	15	150.000.000	PAD	dok	15	165.000.000
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>										
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	periode penyediaan gaji dan tunjangan	Prov. Jambi	bln	14	10.223.617.203	PAD	bln	14	11.245.978.923
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>										
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan	Prov. Jambi	org	100	29.920.000	PAD	org	100	32.912.000
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>										
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Jumlah Dokumen	Prov. Jambi	lap	1	5.073.140	PAD	lap	1	5.580.454
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan		Prov. Jambi	lap	1	100.001.184	PAD	lap	1	110.001.302

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Prov. Jambi	lap	1	200.459.892	PAD		lap	1	220.505.881
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>											
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah surat	Prov. Jambi	lbr	1200	1.500.000	PAD		lbr	1200	1.650.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	periode penyediaan jasa	Prov. Jambi	bln	12	119.459.880	PAD		bln	12	131.405.868
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan		Prov. Jambi	bln	12	130.001.603	PAD		bln	12	143.001.763
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>											
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	periode penyediaan jasa	Prov. Jambi	bln	12	270.050.000	PAD		bln	12	297.055.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	periode penyediaan jasa	Prov. Jambi	bln	12	205.189.200	PAD		bln	12	225.708.120
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara/ direhabilitasi	periode penyediaan jasa	Prov. Jambi	bln	12	210.000.000	PAD		bln	12	231.000.000
<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>											
<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>											
Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah kab/kota yang difasilitasi pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen	Prov. Jambi	dok	1	250.000.000	PAD		dok	1	275.000.000
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>											

<b>Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>											
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Pemerintah Desa yang difasilitasi dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	jumlah Laporan	Prov. Jambi	lap	1	100.000.000	PAD		lap	1	110.000.000
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga yang difasilitasi	jumlah Laporan	Prov. Jambi	lap	1	1.400.000.000	PAD		lap	1	1.540.000.000
<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>											
<b>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>											
Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	tersusunya Laporan GDPK	Jumlah Dokumen	Prov. Jambi	dok	1	400.000.000	PAD		dok	1	500.000.000
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>											
<b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>											
Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Jumlah Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah Dokumen	Prov. Jambi	dok	1	75.000.000	PAD		dok	1	82.500.000
						<b>15.004.272.102</b>					<b>16.564.699.312</b>

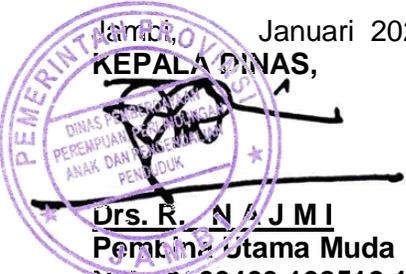
## BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arahan bagi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 dilingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi.

Dalam rangka mencapai visi Provinsi Jambi isi dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi Tahun 2025 diharapkan mampu di aplikasikan oleh seluruh unsur internal Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi , diikuti dengan upaya-upaya pemecahan yang efektif dan efisien sehingga dapat mendorong tercapainya seluruh target pembangunan Tahun 2025 sesuai dengan yang dicita-citakan.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Rencana Kerja (Renja) merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan perencanaan pembangunan dan statistik yang diemban oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi sebagai salah satu OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi.

Semoga Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi Tahun 2025 ini dapat dijadikan bahan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Provinsi Jambi Tahun 2025.

Jambi, Januari 2023  
**KEPALA DINAS,**  
  
**Drs. R. N. J. M. I**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19660403 198512 1001**